

# JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

*Journal of Economic Studies*

*Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2018*

**ANALISIS PENGARUH ANGKATAN KERJA DAN INFLASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM KAJIAN EKONOMI MAKRO ISLAM**

**Amsah Hendri Doni, Iiz Izmuiddin**

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMITMEN ORGANISAS TERHADAP KINERJA INTERNAL AUDITOR ( Pada PDAM Kota Bandung )**

**Feni Lestari**

**MORAL EKONOMI PETANI MISKIN DI JORONG TABEK NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN**

**Vivi Yulia Nora**

**PENGARUH RASIO SOLVABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 - 2016**

**Fitria**

**HUBUNGAN SIMULTAN ANTARA AKTIVITAS PENGAWASAN PERUSAHAAN DENGAN KINERJA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Habibatur Ridhah**

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT BANK SYARIAH BUKOPIN**

**Indah Tri Wulandari, Tartila Devy**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2011-2015**

**(studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)**

**Adilla Juita Siska, Nono Afrianto**



## MORAL EKONOMI PETANI MISKIN DI JORONG TABEL NAGARI TABEL KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

**Vivi Yulia Nora**

*Dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah LAIN Bukittinggi*  
E-mail: [vivyulianora@gmail.com](mailto:vivyulianora@gmail.com)

Diterima: 5 Maret 2018	Direvisi: 25 April 2018	Diterbitkan: 30 Juni 2018
------------------------	-------------------------	---------------------------

### **Abstract**

*This article aims to describe the economic moral of peasants and their implications for poverty reduction in Sub of Tabek Jorong Tabek Nagari district Pariangan Kabupaten Tanah Datar. The values held by peasants give influence to their behavior. Economic moral not oriented to future, does not want to maximize production, be averseto risks and tend to be consumptive having some implications to poverty alleviation efforts. Government's poverty alleviation program that they receive aims to enhance the economic effort that can remove them from poverty. Assistance that has given to them tend to be used for consumption. Government programs to increase agricultural output has not beenresponded properly, so that the government's efforts to get them out of poverty has not reached the target.*

**Keywords:** *economy moral, peasant, proverty reduction*

### **Abstrak**

Artikel ini bermaksud untuk menggambarkan moralekonomi dari petani dan implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Nilai-nilai yang dianut oleh petani memberi pengaruh pada perilaku mereka. Moral ekonomi yang tidak berorientasi pada masa depan, tidak ingin memaksimalkan produksi, takut untuk mengambil risiko berimplikasi pada budaya konsumtif tidak berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan pemerintah yang mereka terima seharusnya digunakan untuk meningkatkan upaya ekonomi yang dapat menghapusnya dari kemiskinan. Bantuan yang telah diberikan kepada mereka cenderung digunakan untuk konsumsi. Program pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian tidak direspon dengan baik, sehingga upaya pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan tidak tercapai.

**Kata Kunci:** moral ekonomi, petani, pengentasan kemiskinan

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Menurut Sherraden, kemiskinan berdampak besar terhadap masyarakat. Diperkirakan sebanyak 75-90 persen orang yang mengalami gangguan mental tidaklah disebabkan karena faktor biologis dan psikologis, melainkan terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi pada bayi, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, dan inilah yang mempengaruhi pertumbuhan mental seseorang. Selain itu kata Sherraden, kemiskinan juga menyebabkan kriminalitas dan eksploitasi anak.<sup>1</sup>

Kemiskinan tersebut merupakan masalah besar yang dihadapi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2005 sebesar 35,1 juta atau 15,97%. Pada tahun 2006 kondisi ini memburuk menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75%. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin berangsur membaik menjadi 37,17 juta jiwa atau 16,58% dan sampai pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang menjadi 31 juta jiwa atau 13,3%.<sup>2</sup> Selanjutnya, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali berkurang menjadi 26,58 juta jiwa atau 10,12%.<sup>3</sup> Meskipun secara persentase mengalami pengurangan, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar dan harus terus diturunkan.

Jumlah penduduk miskin tidak berkurang secara berarti, bahkan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Misalnya di Sumatera Barat, berdasarkan data BPS pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin tidak

berkurang secara berarti dari tahun 2005 sebanyak 482.800 jiwa atau 10,89%, karena hanya berkurang menjadi 457.900 jiwa tahun 2010 atau 9,44%. Kemudian pada tahun 2017 berkurang menjadi 359,99 ribu jiwa atau 6,75%. Di Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk miskin malah meningkat dari tahun 2005 sebanyak 20.500 jiwa atau 6,19% menjadi 23.300 jiwa 6,90% pada tahun 2010, dan kemudian pada tahun 2017 berkurang menjadi 19,27 ribu jiwa atau 5,56%. Meskipun berkurang, namun pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar tersebut terlihat tidak begitu menggembirakan, karena hanya berkurang sebanyak 4,03 ribu jiwa.

Oleh sebab itulah pengentasan kemiskinan tetap menjadi isu penting di Indonesia. Pengentasan kemiskinan ini memerlukan upaya penanggulangan yang serius, yang membutuhkan komitmen, konsistensi dan keberlanjutan program. Usaha mengatasi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diimplementasikan melalui berbagai strategi pengentasan kemiskinan.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi persentase kemiskinan masih tinggi dan tidak berkurang secara berarti, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Beberapa strategi pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan pemerintah misalnya, strategi pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan pada kenyataannya belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program

---

<sup>1</sup> Michael Sherraden, (2006), *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 18

<sup>2</sup> Data BPS pada tahun 2010

<sup>3</sup> Data Sosial Ekonomi tahun 2017

penanggulangan kemiskinan, mulai dari program penyelamatan, seperti jaringan pengaman sosial, sampai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan berbagai instansi pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut hasil penelitian Afrizal dkk, penyebab gagalnya program pengentasan kemiskinan ini adalah pertama berkaitan dengan sifat program; kedua berkaitan dengan pengelolaan program; ketiga berkaitan dengan partisipasi lembaga dan tokoh-tokoh lokal. Hal ini bisa dilihat dari program Pengembangan Keuangan Mikro yang tidak bertahan lama disebabkan kemacetan pengembalian pinjaman oleh kelompok simpan pinjam.<sup>5</sup>

Selain gagalnya program pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor diatas, pengentasan kemiskinan juga memberikan implikasi lain pada masyarakat diantaranya strategi pengentasan kemiskinan yang bersifat karitatif (charity) mengakibatkan masyarakat bergantung pada pihak luar, dan bantuan yang diberikan sering digunakan untuk kepentingan konsumtif, sehingga orang miskin tersebut tidak bisa keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>6</sup>

Pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh mentalitas orang miskin. Mentalitas orang miskin yang dapat menghambat pengentasan kemiskinan adalah moral ekonomi petani miskin yang tidak mau mengambil risiko dan hanya berorientasi masa

kini, kurang disiplin dan konsumtif.<sup>7</sup> Sikap petani yang demikian diwariskan dari generasi-kegenerasi dan membentuk suatu kebudayaan kemiskinan.

Pertanian subsisten<sup>8</sup>, mempunyai risiko yang tinggi dan penuh ketidakpastian, hal ini membuat motivasi pokok dalam kehidupan petani bukan mendapatkan pendapatan, melainkan mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan petani miskin enggan untuk beralih dari pola pertanian tradisional yang telah dikuasai dan dipraktikkan bertahun-tahun ke cara-cara baru yang belum tentu bisa membuahkan hasil yang lebih baik.

Di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 19,9 juta jiwa, dan pada tahun 2017 penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 16,31 juta jiwa dengan 5,97 juta jiwa diantaranya berprofesi dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk sektor pertanian di Indonesia memang cukup besar karena lahan pertanian yang luas, yaitu 7,75 juta ha per-tahun 2017.

---

<sup>7</sup> Suparjan dan Hemptri Suyatno, (2003), *Pengembangan masyarakat...*, h. 151

<sup>8</sup> Pertanian subsisten disebut juga dengan pertanian swasembada (*self-sufficiency*) dimana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi sendiri dan keluarga. Tanaman yang ditanam biasanya tergantung pada apa yang diinginkan oleh keluarga tersebut untuk dimakan dengan mempertimbangkan juga harga pasar. Intinya, cara hidup petani jenis ini cenderung minimalis. Usaha-usaha pertanian yang dilakukan lebih kepada bagaimana dapat sekedar bertahan hidup. Lihat Damsar, (2016), *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Ed-1, Jakarta: Kencana, 114

---

<sup>4</sup>Afrizal, et.al., (2006), *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Yang Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan Dalam Era Otonomi Daerah di Sumatera Barat*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, h. 4

<sup>5</sup>Afrizal, et.al., (2006), *Pemetaan Kemiskinan ...*, h. 90

<sup>6</sup>Suparjan dan Hemptri Suyatno, (2003), *Pengembangan masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, h. 151

Namun, jumlah tersebut belum dapat menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural dan kultural, namun juga berkaitan moral ekonomi mereka, salah satunya pola bertani secara subsisten sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya di atas.

Oleh karena itu perlu memperhatikan moral ekonomi petani dalam hal pengentasan kemiskinan. Beberapa usaha pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah terhadap petani, namun usaha ini terlihat belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh faktor struktur maupun oleh faktor budaya. Moral ekonomi petani sangat mempengaruhi perilaku petani dalam melakukan tindakan ekonomi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Masyarakat di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka ada yang mengolah lahan milik sendiri, mengolah lahan milik orang lain dan juga menjadi buruh tani yang menerima upah dengan menjual jasa mereka. Selain bertani masyarakat di Jorong Tabek, sebahagian memiliki mata pencaharian sampingan seperti membuka warung kecil-kecilan, menjadi tukang ojek, tukang pijit, bahkan ada yang menjadi pengemis.

Menurut hasil penelitian Afrizal, dkk. di wilayah Sumatera Barat, masyarakat golongan miskin pada daerah pertanian sawah menunjuk pada rumah tangga yang mengandalkan pendapatan dari buruh tani, petani penggarap dan petani lahan sempit yang menguasai lahan  $\leq$   $\frac{1}{4}$  ha. Orang miskin di daerah perdesaan juga

menunjuk pada buruh tani yang memiliki pekerjaan ganda.<sup>9</sup>

Pemerintah telah melaksanakan program untuk meningkatkan usaha pertanian seperti program Padi Tanam Sabatang (PTS) dan memberikan penyuluhan kepada petani tentang cara-cara pertanian yang dapat meningkatkan hasil produksi, tetapi pada kenyataannya program ini tidak mengalami keberhasilan. Selain program untuk meningkatkan hasil pertanian, pemerintah juga memberikan bantuan sapi kepada petani untuk ditenakkan, tetapi program ini juga tidak berhasil, bantuan sapi yang diterima tidak ditenakkan, tetapi dijual oleh petani.<sup>10</sup>

Menurut Oscar Lewis dalam Suparlan, orientasi nilai, pola hidup, dan cara berpikir orang miskin berkaitan dengan perilaku kerja orang miskin. Cara hidup inilah yang menjadi landasan bagi terbentuknya kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki. Kebudayaan kemiskinan mendorong terwujudnya sikap menerima nasib, meminta-minta atau mengharapkan bantuan sedekah.<sup>11</sup> Jadi, dalam hal pengentasan kemiskinan, orientasi nilai, dan pola hidup yang berkaitan dengan perilaku kerja akan berimplikasi terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan. Bagi petani miskin moral ekonomi mereka yang menghindari risiko dan berorientasi masa kini, hanya bekerja keras untuk makan, harus hidup selaras dengan alam dan mengharap bantuan orang lain

---

<sup>9</sup>Afrizal, *et.al.*, (2006), *Pemetaan Kemiskinan ...*, h. 37-38

<sup>10</sup> Berdasarkan data di lapangan yang didapatkan melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tabek dan Ketua Kelompok Tani Sumariah Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.

<sup>11</sup> Parsudi Suparlan, (1993), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, h. xvii

menyebabkan mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Telah banyak upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), Kredit Mikro Nagari (KMN) dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya masyarakat miskin masih banyak yang belum keluar dari kemiskinannya. Kegagalan pengentasan kemiskinan ini disebabkan oleh pemikiran yang menyederhanakan persoalan orang miskin.

Moral ekonomi petani miskin pada masyarakat pedesaan perlu mendapat perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena moral ekonomi petani miskin berpengaruh terhadap perilaku ekonomi petani miskin, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada usaha pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suharto dalam bukunya yang berjudul "*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*". Ia mengatakan bahwa sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi dan tidak memiliki jiwa berwirausaha merupakan ciri dari kemiskinan kultural.<sup>12</sup> Hal ini merupakan moral ekonomi yang membuat para petani tidak kunjung bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu sendiri.

Selain itu, menurut Scott dalam Sairin et.al, nilai-nilai sosial ditempatkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Menurutnya, perilaku petani miskin diatur oleh moralitas tertentu yang umum dikenal sebagai

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, h. 18

etika substansi.<sup>13</sup> Berdasarkan hal ini, maka nilai-nilai moral ekonomi petani perlu diubah.

Bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana moral ekonomi petani miskin di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan, serta mengetahui keterkaitan antara moral ekonomi petani miskin dengan pengentasan kemiskinan yang diterapkan pada daerah tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Afrizal, penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang ilmu-ilmu sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>14</sup>

Adapun lokasi penelitian di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dipilih secara *purposive* dengan alasan mayoritas penduduk di nagari ini adalah petani. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk di Jorong Tabek adalah sebanyak 3.659 jiwa dengan jumlah petaninya sebesar 1.467 jiwa atau 40,09%.<sup>15</sup>

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, peneliti tidak melakukan wawancara

---

<sup>13</sup> Sjafriz Sairin, (2002), *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 219

<sup>14</sup> Afrizal, (2008), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND, h. 18

<sup>15</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Tabek.

berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya mempunyai pertanyaan yang umum, yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara berikutnya.<sup>16</sup>

Wawancara mendalam dilakukan dengan bentuk wawancara tidak berstruktur. Informan bebas menjawab pertanyaan dengan bercerita, mengalir apa adanya, dan wawancara ini dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam dan utuh. Teknik observasi digunakan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari wawancara mendalam.

Adapun informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*. Artinya, informan penelitian dipilih secara sengaja dengan anggapan informan dapat memberikan keterangan atau data mengenai permasalahan penelitian. Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai orang miskin di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.
- b. Petani miskin yang bekerja sebagai petani, buruh tani dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
- c. Pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Informan yang penulis pilih adalah informan yang dianggap mampu memberikan sejumlah informasi yang penulis butuhkan dan sudah cukup lama penulis kenal. Adapun

informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang petani miskin, staf pemerintah Nagari Tabek, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tabek dan Ketua Kelompok Tani Sumariah di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan.

### 3. Kajian Teoritis

#### 3.1. Definisi Kemiskinan dan Petani

##### 3.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologi berarti hal miskin; keadaan miskin; kemelaratan; kepaan.<sup>17</sup> Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi mengenai kemiskinan ini, salah satunya yang dikemukakan oleh Suparlan dalam bukunya yang berjudul “*Kemiskinan di Perkotaan*”, adalah suatu standar hidup yang rendah atau minim, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sekelompok individu dibanding standar kehidupan yang berlaku umum dalam masyarakat di sekitarnya.<sup>18</sup>

Terdapat dua jenis kemiskinan menurut menurut Baswir dan Sumodiningrat, sebagaimana yang dikutip oleh Setiadi dan Kolip. *Pertama*, kemiskinan absolut yaitu kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan di bawah standar, yang dalam hal ini menurut BPS adalah sebesar Rp 401.220,- (empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah), atau jumlah pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum. *Kedua*, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat dari perbandingan antara tingkat

---

<sup>16</sup>Afrizal, (2008), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 24

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, h. 1032

<sup>18</sup>Parsudi Suparlan, (1993), *Kemiskinan...*, h. xi

pendapatan suatu individu dengan tingkat pendapatan individu lain pada umumnya pada suatu lingkungan tertentu. Misalnya seorang yang tergolong miskin disuatu daerah belum tentu tergolong miskin di daerah lainnya.<sup>19</sup>

Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari sisi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan) yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara. Di Indonesia Badan Pusat Statistik menetapkan ukuran garis kemiskinan berdasarkan komponen untuk makanan (pangan) sebesar 2100 kalori/hari/kepala dan komponen non makanan (perumahan<sup>20</sup>, kesehatan<sup>21</sup>, pendidikan<sup>22</sup>, transportasi dan sebagainya).

Meskipun ukuran kemiskinan tersebut dapat dilihat dari berbagai

aspek, seperti dari aspek ekonomi, kesehatan, sosil, partisipasi, pemenuhan hak-hak dasar, namun ukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah ukuran pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.<sup>23</sup> Ukuran pendapatan yang dimaksud adalah sebesar Rp 401.220,- (empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) per-kapita per-bulan, sedangkan pengeluarannya adalah kurang dari Rp 13.374,- (tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) per-bulan.

### 3.1.2. Petani

Petani adalah orang yang bercocok tanam dan menggantungkan seluruh atau sebagian kebutuhan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.<sup>24</sup> Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani. Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar di antaranya di pinggiran kota hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>25</sup>

Menurut Oscar Handlin dalam Redfield, terdapat beberapa ciri-ciri petani secara umum. Ciri pertama adalah dimana-mana ada ikatan pribadi dengan tanah. Kedua, keterikatan pada desa atau komunitas lokal. Ketiga, pentingnya keluarga secara sentral.

---

<sup>19</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 795-796

<sup>20</sup> Ukuran kemiskinan dalam hal perumahan menurut BPS antara lain adalah rumah yang lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>, jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester, dan tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar di rumah.

<sup>21</sup> Ukuran kemiskinan dalam hal kesehatan salah satunya adalah tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.

<sup>22</sup> Ukuran kemiskinan dalam hal pendidikan adalah pendidikan kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/SD.

---

<sup>23</sup> Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat, (2007), *Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Mikro Nagari*, Padang: tp, h. 17

<sup>24</sup> Fadholi Hernanto, (1996), *Ilmu Usabatani*, Jakarta: Penebar Swadaya, h. 26

<sup>25</sup> Witrianto, (2011), *Apa dan Siapa Petani*, <http://witrianto.blogdetik.com>, diakses pada tanggal 02 Desember 2018



Keempat, perkawinan sebagai persiapan bagi kemakmuran ekonomi. Kelima, tempat ketegangan antara keterikatan kepada tanah dan dunia lokal dan keharusan untuk menghasilkan tanaman penghasil uang.<sup>26</sup>

### 3.2. Penyebab Kemiskinan

Secara umum terdapat dua penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang dibuat oleh manusia seperti kebijakan ekonomi yang berat sebelah, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung lebih banyak memberikan keuntungan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.<sup>27</sup>

Kemiskinan struktural juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang membuat seseorang atau sekelompok tidak dapat menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini akan menimbulkan rantai kemiskinan dalam masyarakat. Aset dan sumberdaya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga, sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur yang demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya. Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki sedikit tanah termasuk kedalam

mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.<sup>28</sup>

Selanjutnya, penyebab kedua kemiskinan adalah terkait kultural, yaitu mengacu pada sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya yang membuat mereka merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.<sup>29</sup>

Kemiskinan kultural ini tidak sesuai dengan masyarakat modern. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi dan tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan ciri dari kemiskinan kultural.<sup>30</sup>

Kemudian, dewasa ini teori kultural berkembang menjadi teori modernisasi. Dalam teori ini kemiskinan terjadi disebabkan oleh faktor individu. Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah etos kerja, tidak memiliki etika wirausaha atau budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras.<sup>31</sup>

Selain dua penyebab kemiskinan di atas, terdapat penyebab lain berdasarkan sudut teori kebudayaan kemiskinan menurut Lewis dalam Suparlan. Mengacu kepada teori ini, kebudayaan disebut sebagai salah satu penyebab kemiskinan, yaitu mencakup nilai dan norma yang dianut suatu masyarakat yang akan diinternalisasi oleh seseorang dan menjadi pedoman bertindak termasuk dalam

---

<sup>26</sup> R. Redfield, (1985), *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Jakarta: Rajawali, h. 86

<sup>27</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi...*, h. 797

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, (2005), *Analisis Kebijakan Publik...*, h. 18

<sup>29</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi...*, h. 797

<sup>30</sup> Edi Suharto, (2005), *Analisis Kebijakan Publik...*, h. 18

<sup>31</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi...*, h. 803

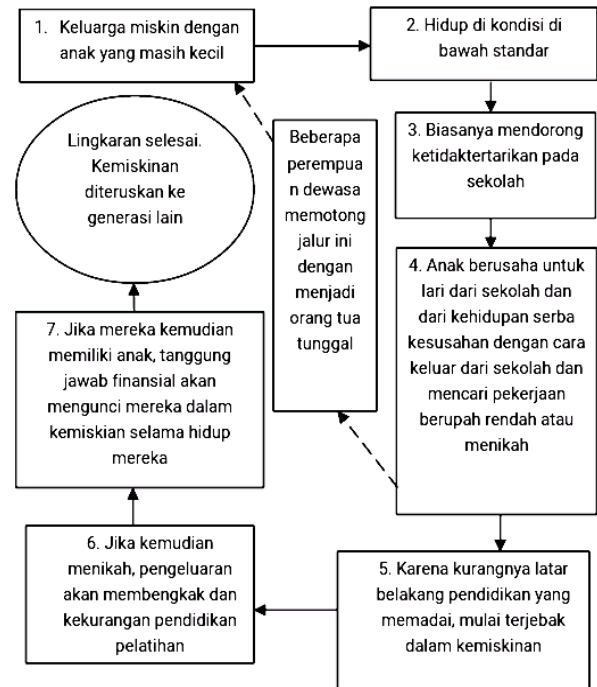
tindakan ekonomi. Sehubungan dengan itu kita perlu memperhatikan kebudayaan sebagai faktor penyebab kemiskinan.<sup>32</sup>

### 3.3. Teori Moral Ekonomi

Kemiskinan sejatinya berkaitan erat dengan kebudayaan, sehingga disebut dengan istilah kebudayaan kemiskinan. Kebudayaan kemiskinan dalam pengertian Oscar Lewis, sebagaimana dikutip oleh Suparlan, mencakup apa yang diyakini (nilai-nilai), respons dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan).<sup>33</sup>

Menurut teori budaya miskin Oscar Lewis, gambaran budaya kelompok kelas bawah, khususnya pada aspek orientasi masa sekarang dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan dikalangan mereka dari satu generasi kegenerasi berikutnya.<sup>34</sup>

Lewis menyimpulkan kelompok miskin menjadi miskin karena gaya hidup mereka dipengaruhi oleh budaya tertentu yang disebut budaya kemiskinan. Berikut ini gambar lingkaran kemiskinan menurut Oscar Lewis yang dikutip dari buku Suharto.<sup>35</sup>



Gambar 3.3.1. Lingkaran Kemiskinan

Menurut Lewis, individu yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan seringkali bersikap pesimis dengan selalu beranggapan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, hal ini disebut dengan fatalisme. Orang yang menganut budaya kemiskinan berorientasi pada masa kini dan tidak memperhatikan rencana masa depan. Budaya kemiskinan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan berkembang di masyarakat yang pernah mengalami keterpurukan ekonomi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya keahlian kerja serta rendahnya upah yang diterima oleh para pekerja. Kondisi ini menciptakan perkembangan tingkah laku dan nilai yang penuh keputusasaan.<sup>36</sup>

Menurut teori kemiskinan Oscar Lewis manusia menjadi miskin karena mereka memiliki kepercayaan dan perilaku yang

<sup>32</sup> Parsudi Suparlan, (1993), *Kemiskinan...*, h. 6

<sup>33</sup> Parsudi Suparlan, (1993), *Kemiskinan...*, h. 3

<sup>34</sup> Michael Sherraden, (2006), *Aset Untuk Orang Miskin...*, h. 51

<sup>35</sup> Edi Suharto, (2007), *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, h. 76

<sup>36</sup> Edi Suharto, (2007), *Kebijakan Sosial ...*, h. 76

membuat mereka berada dalam keterbelakangan.<sup>37</sup> Budaya kemiskinan dipandang terinternalisasi dan langgeng. Sekali kebudayaan itu tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi kegenerasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak.

Teori kebudayaan kemiskinan memiliki persamaan dengan teori moral ekonomi James C. Scott. Menekankan terhadap etika subsistensi yang berarti perspektif petani menghadapi keadaan.<sup>38</sup> Ciri-ciri etika subsistensi adalah perspektif yang mementingkan terpenuhinya kebutuhan dasar bukan mendapatkan keuntungan yang besar dalam produksi mereka.<sup>39</sup>

Dalam hal upaya pengentasan kemiskinan, keberhasilan pengentasan kemiskinan terkait dengan moral ekonomi petani miskin. Bagi petani miskin yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka. Jadi, ketika mereka diberikan peluang untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, mereka cenderung tidak memanfaatkan peluang tersebut. Sebagai contoh ketika petani miskin diberikan bantuan kredit usaha mikro, pinjaman yang diberikan kepada mereka terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa moral ekonomi petani

adalah nilai-nilai moral yang mereka anut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dan nilai-nilai moral mereka sesuai dengan kebudayaan kemiskinan, dimana kebudayaan kemiskinan itu sendiri merupakan suatu adaptasi dari suatu keadaan miskin yang diderita oleh suatu masyarakat.

Keadaan miskin ini bisa disebabkan baik oleh individu maupun struktur sosial. Dalam hal melakukan tindakan ekonomi, mereka berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsistensi. Bagi petani miskin pemenuhan kebutuhan pada saat sekarang lebih penting daripada penghasilan lebih tinggi yang akan mereka dapatkan jika mereka memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan kepada mereka baik berupa pinjaman modal yang diberikan kepada mereka maupun program-program pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

### 3.4. Teori Fungsionalisme

Menurut Parsons, sebagaimana dikutip oleh Poloma, masalah utama bagi tindakan individu bukanlah bersifat individual, melainkan norma-norma dan nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku.<sup>40</sup> Bagi Parson nilai-nilai yang dianut oleh individu penting sebagai dasar perbuatan. Nilai-nilai itu terinternalisasi oleh individu sebagai hasil dari proses sosialisasi.

Dalam hal pengentasan kemiskinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh orang miskin, mempengaruhi perilaku orang miskin dalam melakukan tindakan ekonomi. Nilai-nilai ini mereka peroleh dari proses

---

<sup>37</sup> James Midgley, (2005), *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Diperta Depag RI, h. 111

<sup>38</sup> James C. Scott, (1994), *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Terj.), Jakarta: LP3ES, h. 44

<sup>39</sup> James C. Scott, (1994), *Moral Ekonomi Petani...*, h. 49

---

<sup>40</sup> Margaret M. Poloma, (1987), *Sosiologi Kontemporer...*, h. 171

sosialisasi dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, teori yang tepat dalam hal ini adalah teori fungsionalisme.

Teori fungsionalisme dipakai sebagai landasan sosiologi teori moral ekonomi yang menekankan perlunya perhatian kajian sosiologi terhadap nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh individu dalam suatu masyarakat.

Teori fungsionalisme pada intinya memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem yang saling terkait dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa struktur sosial dan institusi sosial berhubungan dengan fungsi dari fakta-fakta sosial. Fungsi dalam teori ini berkaitan dengan akibat-akibatnya yang dapat diamati dalam proses adaptasi atau penyesuaian suatu sistem.<sup>41</sup>

Menurut Parsons, fungsi-fungsi yang ada dalam suatu sistem ada empat, yaitu:<sup>42</sup>

1. *Adaptation* (A), yaitu sebuah sistem ibarat makhluk hidup. Artinya, untuk dapat bertahan hidup, maka sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.
2. *Goal attainment* (G), yaitu pencapaian tujuan. Sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas untuk berusaha mencapai tujuan utamanya.

---

<sup>41</sup> George Ritzer, (1992), *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, h. 22

<sup>42</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goddman, (2010), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 121

3. *Integration* (I), yaitu sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Integrasi adalah fungsi yang mengatur hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Fungsi ini juga bertugas mengatur hubungan antara fungsi *adaptation*, *goal*, dan *latency*.
4. *Latency/latten pattern maintenance* (L), yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Untuk menjelaskan tentang moral ekonomi petani dan implikasinya bagi pengentasan kemiskinan lebih ditekankan pada fungsi *latency/latten pattern maintenance*. Dalam teori sistem Parsons, *latency/latten pattern maintenance*, dihubungkan dengan sistem sosial budaya, karena fungsi ini menekankan nilai dan norma budaya yang dilembagakan dalam sistem sosial. *Latency* berarti, sistem harus mampu berfungsi sebagai pemeliharaan pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural. Sistem kultural bekerja dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.

Parsons melihat dunia sosial dalam hubungan dengan ide-ide masyarakat, terutama pada norma-norma dan nilai-nilai. Norma-norma adalah segala bentuk peraturan yang secara sosial dapat diterima dan berguna dalam mengambil atau memutuskan tindakan-tindakan. Nilai-nilai secara tepat dapat dilukiskan sebagai kepercayaan-kepercayaan mereka tentang

bagaimana seharusnya dunia dan nilai tersebut mempunyai pengaruh dalam menentukan tindakan seseorang.<sup>43</sup>

Tindakan sosial merupakan suatu proses dimana seseorang terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. Semua hal tersebut dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial.<sup>44</sup>

Menurut Parson dalam Ritzer dan Goodman, sistem kultural lebih penting daripada struktur bagi sistem sosial. Kultur dibayangkan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Kultur mempunyai kapasitas untuk menjadi komponen sistem yang lain. Jadi, dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Namun, perlu dipahami bahwa sistem kultural tak semata-mata menjadi bagian sistem yang lain. Kultur juga mempunyai eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol dan gagasan. Aspek-aspek sistem kultural ini tersedia untuk sistem sosial dan sistem personalitas, tetapi tidak menjadi bagian dalam kedua sistem itu.<sup>45</sup>

Untuk mengentaskan kemiskinan sebuah sistem budaya harus mampu menciptakan seperangkat nilai dan norma yang mendukung agar tujuan untuk pengentasan kemiskinan tercapai. Nilai-nilai yang dianut masyarakat penting untuk dasar bagi mereka dalam melakukan tindakan, karena itu nilai tersebut harus mendukung mereka untuk melakukan tindakan ekonomi yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Moral ekonomi petani miskin yang telah tersosialisasi dalam masyarakat petani pedesaan, telah menyebabkan mereka susah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlu dilakukan perubahan nilai-nilai moral yang dianut oleh petani miskin dengan cara merubah pola pikir, dan etos kerja terhadap anak-anak mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi pada lembaga pendidikan.

Pendidikan didefinisikan oleh Durkheim sebagai proses yang ditempuh sang individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual dan paling utama, bagi Durkheim, adalah alat-alat moral yang dibutuhkan agar dapat berfungsi dalam masyarakat.<sup>46</sup> Dengan demikian, untuk mengatasi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh moral ekonomi perlu pendidikan nilai-nilai yang dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

### 3.5. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rencana yang

---

<sup>43</sup> Ian Craib, (1994), *Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Habermas* (terj.), Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 57

<sup>44</sup> George Ritzer, (1992), *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan ...*, Jakarta: Rajawali Press, h. 58

<sup>45</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goddman, (2010), *Teori Sosiologi Modern...*, h. 121

---

<sup>46</sup> George Ritzer, (2012), *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakbir Posmodern* (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 181

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>47</sup> Sedangkan kata pengentasan berasal dari kata “entas”, yang berarti menyadarkan, memperbaiki nasib.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka strategi pengentasan kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu rencana yang cermat yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Terdapat dua strategi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. *Pertama*, strategi yang memberikan tanggung jawab utama pada individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. *Kedua*, strategi yang bergantung pada pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Selain dua strategi tersebut di atas, dewasa ini dikenalkan pula strategi yang menggunakan institusi lokal, yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup didalam komunitas tempatan, strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis institusi masyarakat setempat.<sup>50</sup>

Agar semua strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan dapat sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat secara umum dan masyarakat miskin sendiri. Untuk memecahkan masalah kemiskinan yang

disebabkan oleh moral ekonomi petani miskin dan budaya kemiskinan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kualitas individual seperti meningkatkan etos kerja, kebiasaan menabung, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta mengubah pola pikir mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani miskin di Jorong Tabek pada umumnya adalah petani subsistensi yang hanya melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk sekedar untuk bertahan hidup. Mereka melakukan produksi yang hasilnya untuk kebutuhan sendiri, tidak dipasarkan, sedangkan kalau ada produksi yang dipasarkan tidak dimaksudkan untuk mencapai keuntungan yang komersil.

Petani subsistensi adalah petani yang memiliki risiko tinggi dan hasil yang tidak menentu dalam produksinya. Pada umumnya mereka adalah petani sawah dengan metode produksi pertanian yang dari waktu kewaktu tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun telah diperkenalkan metode pertanian yang baru, namun tidak banyak dari mereka yang melaksanakan metode ini. Hal ini disebabkan oleh moral ekonomi mereka yang takut menghadapi risiko, berorientasi masa kini.

Petani miskin di daerah ini adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Konsephidupmereka hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya sebatas kebutuhan subsistensi. Jika hasil panen mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, mereka akan bekerja sebagai buruh tani atau kadang berjualan kecil-kecilan.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Bahasa...*, h. 1515

<sup>48</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprilillia Senja, (tt), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ttp: Difa Publisher, h. 284

<sup>49</sup> James Midgley, (2005), *Pembangunan Sosial...*, h. 150

<sup>50</sup> Afrizal, et.al., (2006), *Pemetaan Kemiskinan ...*, h. 18

Kesempatan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak seringkali mereka lepaskan karena itu bukan merupakan tujuan hidup mereka, yang paling penting bagi mereka adalah terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan makanan. Teknik bertani mereka disesuaikan dengan modal yang mereka miliki, sehingga ketika mereka ditawarkan untuk menggunakan teknik pertanian yang baru oleh pemerintah, mereka cenderung tidak mengikutinya. Keamanan subsistensi dan menghindari risiko adalah alasan mereka untuk tidak mengikuti program pemerintah tersebut.

## Moral Ekonomi Petani Miskin di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan

### 1. Orientasi Produksi Subsistensi

Petani miskin dalam penelitian ini adalah petani subsisten yang hanya menggarap sebagian kecil lahan berkisar 0,25 hingga 1 hektar. Menurut peraturan perundang-undangan No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian pasal 8 berbunyi: “*pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 hektar*”. Jadi untuk dapat hidup layak petani penggarap membutuhkan lahan lebih kurang 4 hektar. Sedangkan bagi petani yang memiliki lahan sendiri petani membutuhkan sekurang-kurangnya 2 hektar lahan.

Sebagian besar petani miskin menggarap lahan orang lain dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman padi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat setempat. Mereka menanam padi rata-rata dua kali dalam setahun. Dalam usaha produksinya petani cenderung menyesuaikan dengan modal yang mereka miliki. Mereka tidak berusaha untuk memaksimalkan hasil produksi. Hal ini terlihat dari banyaknya

jumlah pupuk yang mereka berikan dan cara-cara mereka menghadapi hama yang menyerang tanaman padi mereka.

Petani miskin tidak memberikan pupuk sesuai anjuran dari PPL, jika PPL menganjurkan pemberian pupuk sebanyak 10 kg untuk 1 gantang benih, petani miskin rata-rata memberi pupuk hanya 6-7 kg pupuk untuk 1 gantang benih. Alasan petani tidak memberi pupuk adalah karena kurangnya modal, alasan lainnya adalah karena jika diberi pupuk banyak nanti *siangannya* juga banyak. Ketika tanaman padi terserang hama petani miskin juga tidak memberi pestisida dengan alasan harganya mahal, nanti kalau panennya gagal mereka akan mengalami banyak kerugian.

Orientasi produksi petani miskin di Jorong Tabek adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sebagaimana yang dikemukakan oleh PN sebagai berikut:

*Tujuan wak mananam padi ko yo tarutamo untuak makan, kok ado sisonyo dijua ntuak balanjo wak sabari-bari nyo.* Artinya, tujuan menanam padi adalah untuk makan, jika ada bersisa dijual untuk belanja sehari-hari.<sup>51</sup>

Kemudian, DN juga mengatakan bahwa tujuan ia bertani hanya untuk makan, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari didapatkan dari menjadi buruh tani dan menjadi tukang pijit.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa petani hanya menggunakan hasil panen mereka untuk kebutuhan bahan pangan saja. Untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti

<sup>51</sup> PN, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 September 2012.

<sup>52</sup> DN, *Wawancara Pribadi*, Senin 03 September 2012.

untuk membeli pakaian, lauk pauk, belanja sehari-hari dan biaya sekolah anak bagi mereka yang masih menyekolahkan anaknya, diperoleh dengan bekerja sebagai buruh tani, membuka warung kecil-kecilan, menjadi tukang pijit atau pekerjaan sampingan lainnya yang dapat menghasilkan uang.

## 2. Tidak Berusaha Memaksimalkan Hasil Pertanian

Bagi petani miskin di Jorong Tabek, kita perlu mempertimbangkan hal lain, ada konsepsi panen besar dan panen kecil. Maksudnya adalah pada waktu-waktu tertentu jumlah hasil panen akan banyak, namun pada waktu lainnya hasil panen jumlahnya sedikit. Mereka beranggapan, bahwa hasil padi bergantung kepada kondisi alam dan hama tanaman. Jadi tidak terkait dengan cara-cara produksi misalnya berapa jumlah pupuk yang harus diberikan. Seperti yang dituturkan oleh SR sebagai berikut:

*Hasil padi ko ndak tagantuang na ka pupuak do, kadang-kadang hasil padi ko yo ado rancak, kadang-kadang kurang dapek padi ko nyo, tagantuang kamuaro kadang-kadang. Artinya, hasil padi tidak terlalu bergantung pada jumlah pupuk yang diberikan, kadang-kadang ada hasil panen bagus, kadang-kadang kurang bagus hasilnya tergantung pada bahaya yang mengancam tanaman.<sup>53</sup>*

Adanya kepercayaan bahwa hasil produksi untung-untungan, pada waktu-waktu tertentu hasil panen banyak dan pada waktu lain hasil panen sedikit dengan kata lain adanya kepercayaan petani bahwa adanya musim panen baik dan musim panen buruk mengakibatkan petani tidak berusaha untuk memaksimalkan hasil produksinya dengan cara pemupukan yang

sesuai dengan anjuran PPL, padahal jumlah pemberian pupuk yang dianjurkan PPL di daerah ini sudah lebih sedikit dibandingkan dengan pemberian pupuk yang dianjurkan oleh ahli pertanian untuk tanaman padi.

## 3. Takut Mengambil Resiko

Ketakutan petani miskin mengambil risiko dalam usaha pertanian mereka menyebabkan petani tidak mau mencoba memproduksi tanaman lain selain padi yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar seperti memproduksi tanaman cabe. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran-kekhawatiran dari petani tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh ID berikut:

*Batanam lado tu gadang risiko, modalnyo gadang, panyakik banyak, indak lanteh angan wak do, yo untuang gadang kok barasil tapi takuk wak risiko. Artinya, menanam cabe itu besar risikonya, modalnya besar, penyakitnya banyak, tidak sanggup saya, memang untungnya besar kalau berhasil, tapi saya takut risikonya.<sup>54</sup>*

Banyaknya hama yang dapat menyerang tanaman cabe juga menyebabkan petani miskin tidak mau menanam tanaman ini. Meskipun ada bantuan dari Badan Amal Zakat bagi petani miskin, petani di sini juga tidak mau memanfaatkan bantuan ini untuk usaha tanaman cabe dengan alasan menanam tanaman ini memiliki risiko yang besar jika terjadi kegagalan panen, walaupun tanaman ini menjanjikan keuntungan yang besar jika panen berhasil.

<sup>53</sup> SR, *Wawancara Pribadi*, Senin 10 September 2012.

<sup>54</sup> ID, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 29 September 2012.



#### 4. Prioritas Meminjam Ketimbang Meningkatkan Hasil Produksi

Kebiasaan petani meminjam membuat mereka tidak mempunyai motivasi untuk meningkatkan hasil produksi, karena ketika mengalami kesulitan ekonomi mereka dapat meminjam kepada rentenir, patron mereka atau pada pemilik heler. Mereka tidak berusaha meningkatkan hasil produksi, tetapi malah tergantung kepada hutang yang pada akhirnya membuat mereka semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Bahkan tidak jarang petani tersebut menunggak pembayaran dan dihardik oleh rentenir, namun tetap saja melakukan peminjaman, seperti yang dikemukakan oleh DL sebagai berikut:

*Wak acok maminjam ka urang batak yang mangkreditkan pitih tu ha, tapi beko dibaiyanyo dua kali lipek, tapi baa jo lai wak paralu pitih. Kalau maminjam ka urang tu wak bisa maminjam bara sajo, asal lai mampu mambaiyanyo, tapi wak ndak lo talok maminjam banyak-banyak do, takuik ndak tabayia beko. Urang batak tu acok berang-berang kalau awak talambek mambayia utang. Nyo kadatang satiok hari karumah mamintak utangnyo jo mangecek kasa. Artinya, Saya sering meminjam kepada orang batak, tapi nanti dibayar dua kali lipat, tetapi mau bagaimana lagi saya perlu uang. Kalau meminjam kepada orang tersebut saya bisa meminjam berapa saja, asal saya mampu membayarnya, tetapi saya juga tidak terlalu berani meminjam banyak-banyak, takut tidak terbayar. Orang batak itu sering marah-marah kalau saya menunggak hutang saya. Dia akan datang setiap hari menagih hutangnya dan berbicara kasar.<sup>55</sup>*

Selain meminjam pada rentenir, petani tersebut juga meminjam kepada pemilik heler dengan alasan tidak memerlukan proses yang rumit. Akibatnya, pada saat panen tiba mereka tidak bisa menunjang kehidupan mereka menjadi lebih baik, malah harus merelakan sebagian besar dari hasil panen mereka untuk membayar hutang kepada pemilik heler.

#### Keterkaitan Moral Ekonomi Petani Miskin dan Pengentasan Kemiskinan di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan

Nilai-nilai budaya yang dianut oleh petani miskin di Jorong Tabek, menyebabkan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berhasil karena petani miskin di Jorong Tabek tidak menggunakannya untuk upaya ekonomi yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

#### KESIMPULAN

Kemiskinan di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan terkait dengan moral ekonomi yang dianut oleh rumah tangga miskin. Dalam melakukan kegiatan pertanian mereka berorientasi subsistensi. Mereka melakukan pertanian bukan untuk komersial tetapi untuk kebutuhan sendiri.

Petani miskin di Jorong Tabek tidak berusaha memaksimalkan hasil produksi, karena mereka beranggapan bahwa hasil produksi tidak ditentukan oleh cara produksi melainkan ditentukan oleh musim panen.

Untuk memenuhi kebutuhan emergensi, petani seringkali berutang pada rentenir atau patron mereka. ketergantungan petani terhadap hutang membuat petani terjatuh dalam lingkaran setan kemiskinan.

<sup>55</sup> DL, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 September 2012.

Nilai-nilai budaya yang dianut oleh petani miskin menyebabkan program pengentasan kemiskinan pemerintah yang mereka terima tidak digunakan untuk upaya ekonomi yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Sikap petani miskin yang demikian membuat upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak tercapai.

Berdasarkan fakta yang terlihat berkenaan dengan moral ekonomi petani miskin di atas, maka dirasa perlu adanya pendekatan dan penyuluhan lebih mendalam bagi para petani. Bahkan, jika diperlukan harus dibuat suatu kebijakan tertentu, minimal dari pemerintah desa agar petani miskin dapat mengelola pertanian bukan hanya secara subsisten, namun juga secara komersial. Sehingga dengan demikian petani tersebut diharapkan dapat memiliki moral ekonomi yang baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, ketika petani miskin diberikan suatu bantuan kemiskinan, maka perlu diberikan pendampingan agar bantuan tersebut dapat teralokasi dengan seharusnya. Artinya, bantuan tersebut tidak ditujukan untuk hal-hal di luar yang seharusnya, seperti untuk membayar hutang atau membeli kebutuhan yang dirasa masih bersifat konsumtif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, (2008), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND
- Afrizal, *et.al.*, (2006), *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Yang Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan Dalam Era Otonomi Daerah di Sumatera Barat*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- Craib, Ian (1994), *Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Hambermas* (terj.), Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilillia Senja, (tt), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ttp: Difa Publisher
- Hernanto, Fadholi, (1996), *Ilmu Usabatani*, Jakarta: Penebar Swadaya
- Midgley, James, (2005), *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Ditperta Depag RI
- Redfield, R., (1985), *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Jakarta: Rajawali
- Ritzer, George (2012), *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Posmodern* (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , (1992), *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press

- Ritzer, George dan Douglas J. Goddman, (2010), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sairin, Sjafrin, (2002), *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Scott, James C., (1994), *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Terj.), Jakarta: LP3ES
- Setiadi, Elly M., dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sherraden, Michael, (2006), *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suharto, Edi, (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- , (2007), *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Suparjan dan Hempri Suyatno, (2003), *Pengembangan masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Suparlan, Parsudi, (1993), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat, (2007), *Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Mikro Nagari*, Padang: tp
- Witrianto, (2011), *Apa dan Siapa Petani*, <http://witrianto.blogdetik.com>, diakses pada tanggal 02 Desember 2018